



PAPER – OPEN ACCESS

## Analisis Transitivitas pada Teks UUD 1945 sebelum Amendemen

Author : Elwyn Bastian Sinaga dkk.,  
DOI : 10.32734/lwsa.v3i2.883  
Electronic ISSN : 2654-7066  
Print ISSN : 2654-7058

*Volume 3 Issue 3 – 2020 TALENTA Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



# Analisis Transitivitas pada Teks UUD 1945 sebelum Amendemen

*(Analysis Transitivity the Text of Constitution 1945 before Amendment)*

Elwyn Bastian Sinaga, T. Silvana Sinar, Eddy Setia

*Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, 20155*

elwynbastiansinaga@gmail.com, elwynbastiansinaga@students.usu.ac.id

## Abstrak

Terelaisasinya teks UUD 1945 menjadi sejarah lahirnya konsitusi pertama di Negara Indonesia. Teks UUD 1945 kemudian diamandemaen sebanyak empat kali. Amandemen pertama pada tahun 1999. Amandemen kedua pada 2000. Amandemen ketiga pada tahun 2001. Amandemen keempat pada tahun 2002. Setiap amandemen terjadi perubahan pada bagian isi, tetapi tidak pada bagian pembukaan. Teks UUD 1945 menjadi alat membagikan atau memaparkan pengalaman kepada orang lain. Makna pengalaman tersebut direalisasikan di dalam teks UUD 1945. Ada pun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan makna pengalaman yang berada di dalam teks UUD 1945. Data penelitian ini berupa teks UUD 1945 yang belum diamandemen karena bersifat mendasar dan pertama. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Linguistik Sistemik Fungsional (LSF) yang dipelopori oleh Halliday. Selanjutnya untuk menganalisis data digunakan teknik analisis model Miles, Huberman, dan Saldana. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan, yaitu (1) terdapat enam proses di dalam teks Undang-Undang Dasar 1945 yang didominasi oleh proses material (2) terdapat tiga jenis partisipan, yaitu partisipan berdasarkan prosesnya, partisipan berdasarkan jumlahnya, dan partisipan berdasarkan wujudnya (3) terdapat sepuluh jenis sirkumstan yang didominasi oleh sirkumstan cara dan tidak terdapat sirkumstan rentang waktu. Hal ini menunjukkan bahwa teks UUD 1945 pada umumnya dibangun oleh verba material bersamaan sirkumstan cara dan sirkumstan pandangan, serta partisipan terlibat adalah manusia. Teks UUD setelah amendemen sangatlah penting untuk dianalisis dengan pendekatan-pendekatan ilmu bahasa untuk mendeskripsikan teks UUD lebih jelas dan lebih spesifik.

*Kata kunci:* Linguistik Sistemik; Transivitas; Hubungan Logis Semantik; Metafora.

## Abstract

*The realization of the text of the 1945 Constitution became the history of the birth of the first constitution in the State of Indonesia. The 1945 Constitution text was then amended four times. The first amendment was in 1999. The second amendment was in 2000. The third amendment was in 2001. The fourth amendment was in 2002. Every amendment occurred in the contents section, but not in the opening section. The 1945 Constitution text is a tool for sharing or describing experiences with others. The meaning of the experience is realized in the text of the 1945 Constitution. There is also the purpose of this research, which is to describe the meaning of experience that is in the text of the 1945 Constitution. This research data is in the form of the 1945 Constitution text which has not been amended because it is fundamental and first. The theory used in this study is the Functional Systemic Linguistics (LSF) theory pioneered by Halliday. Furthermore, to analyze the data used the analysis technique of the model of Miles, Huberman, and Saldana. Based on the results of the study found, namely (1) there are six processes in the text of the 1945 Constitution which are dominated by material processes (2) there are three types of participant, namely participants based on the process, participants based on their numbers, and participants based on their form (3) there are The ten types of circumstant are dominated by circumumstan manner and there is no circumstant extent. It is intended that the text of the 1945 Constitution is generally constructed by a material verb along with a circumstance manner and circsumstant angle, the participants of which are human beings. The Constitution text after the amendment is very important to be analyzed with linguistic approaches to describe the text of the Constitution more clearly and more specifically.*

*Keywords:* Systemic Linguistics; Transivity; Semantic Logical Relations; Metaphors.

## 1. Pendahuluan

Teks Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai teks tertulis disahkan sebagai hukum dasar bagi rakyat Indonesia yang memuat peraturan-peraturan dasar negara. Seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam teks UUD 1945 diatur kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan. Di dalam UUD 1945 juga diatur hubungan antarlembaga negara dan warga negara. Hubungan ini bersifat membatasi kekuasaan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), MPR (Majelis Pemusyawaratan Rakyat), MA (Mahkama Agung), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Presiden, dan lembaga lainnya.

Konsitusi UUD 1945 pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Konsitusi ini hanya berlaku hingga 1949. Pada 1945 diberlakukan konsitusi UUD RIS (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat) yang hanya mampu bertahan hingga 1950. Di tahun 1950 konsitusi berubah menjadi UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara). Konsitusi ini berjalan cukup lama, selama sembilan tahun, tetapi dianggap masih belum sempurna. Oleh karena itu, dekret Presiden, 5 juli 1959 memberlakukan kembali UUD 1945 yang berlaku hingga sampai sekarang walaupun diamandemen pada tahun 19 Oktober 1999 amandemen pertama, 18 Agustus 2000 amandemen kedua, 9 November 2001 amandemen ketiga, dan 10 Agustus 2002 amandemen keempat. Namun, teks pembukaan Undang-Undang Dasar tidak diamandemen dan bersifat tetap.

Kesepakatan dasar dalam mengamandemen UUD 1945 untuk tidak mengubah teks pembukaan UUD 1945. Teks pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan dan bersifat mutlak tidak dapat diubah. Hal ini tetap dijaga dan dipertahankan menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia. Suatu kekuatan teks yang mampu bertahan dan mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai yang terkandung di dalam teks pembukaan UUD 1945 mencerminkan budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Bahasa hukum sulit untuk dipahami jika dibandingkan dengan teks yang lainnya. Hal ini penting untuk dianalisis dengan pendekatan ilmu linguistik untuk mengetahui makna bahasa tersebut dengan melibatkan multikonteks [1]

Kerumitan kebahasaan teks hukum ini juga diakui oleh para pakar hukum dan pembuat teks tersebut. Kerumitan bahasa hukum diakibatkan tingginya kekerapan pemakaian struktur kalimat yang tidak gramatikal, termaksud pemanfaatan unsur leksikal yang belum memenuhi kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Secara rinci meliputi (1) huruf kapital; (2) tanda baca; (3) bentuk dan pemilihan kata; (4) pengkalimatan [2]. Memahami peranan bahasa hukum sebagai bagian penting dalam perumusan norma perundang-undangan akan memberi efisiensi dan efektifitas serta validitas dalam merumuskan norma-norma hukum dalam upaya pencapaian tujuan dan fungsi-fungsi hukum, Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah memahami bahasa hukum dengan baik bagi ilmuwan hukum Indonesia, dengan pemahaman bahasa Indonesia dengan baik sebagai media bahasa hukum [3].

Di dalam teks pembukaan UUD dasar tertulis: "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan..." Konjungtif Bahwa dan Sungguhnya digunakan kata secara berlebihan dalam pembukaan teks UUD tersebut. Lazimnya kalimat tersebut, (1) Bahwa Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. (2) Sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Konjungtif bahwa dan sesungguhnya memiliki makna yang sama.

Teori LSF mencakup tiga ranah makna, yaitu ideasional, interpersonal, dan tekstual [4]. Penelitian ini memfokuskan pada ranah ideasional. Jika memperhatikan sepengalasan isi dari teks pembukaan di atas terdapat fungsi ideasional, yaitu transivitas berupa proses, sirkumsan, partisipan dan metafora.

Penelitian di bidang hukum terkhusus membahas teks UUD 1945 belum pernah dilakukan. Penelitian yang relevan membahas makna ideasional dilakukan oleh Oliveira [5] menyajikan analisis LSF dari dua tulisan sampel dari penulisan analitik Universitas California dan penulisan yang ditulis oleh pelajar bahasa Inggris (ELLS). Alaei & Ahangari [6] memfokuskan ke ranah makna ideasional yakni partisipan, proses, dan sirkumstan untuk menganalisis novel "Heart of Darkness". Selanjutnya, penelitian yang relevan membahas transivitas adalah Kondowe [7] membahas Presidents and Ideologies: A Transitivity analysis of Bingu wa Mutharika's inaugural address.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari data penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data secara logis dan empiris. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis Miles, Huberman, dan Saldana [8].

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah klausa yang terdapat pada teks UUD 1945 yang pertama kali dituliskan dan belum diamandemen. Terdapat 4 alinea atau paragraf bagian pembukaan, 37 pasal di bagian isi, dan 6 pasal bagian akhir, yang terdiri atas 4 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan dengan jumlah 118 klausa. Data dirujuk melalui buku yang menuliskan tentang teks UUD 1945.

## 3. Hasil Penelitian

Makna ideasional ditemukan dalam teks UUD 1945, yakni (a) unsur pengalaman meliputi proses, partisipan, dan sirkumstan (b) *logicosemantic relation* (hubungan logis semantik) meliputi, taksis dan parataksis dan (c) pengalaman metafora, meliputi metafora leksikal dan metafora gramatikal.

### 3.1. Proses

Ditemukan enam proses dari 118 klausa di dalam teks UUD 1945, yakni proses material, proses mental, proses relasional, proses tingkah laku, proses verbal, dan proses wujud dengan proporsi yang berbeda-beda. Dengan demikian, proses yang dominan dalam teks UUD 1945 secara berturut-turut adalah proses material, proses relasional, proses mental, proses verbal, proses wujud, dan proses tingkah laku.

Tabel 1. Proporsi Proses

No.	Proses	Jumlah	Persentase (%)
1	Material	86	72.89
2	Relasional	15	12.71
3	Verbal	6	5.08
4	Mental	6	5.08
5	Wujud	3	2.54
6	Tingkah laku	2	1.70
<b>Jumlah</b>		<b>118</b>	<b>100%</b>

Proses material di dalam teks UUD 1945 mendominasi hingga mencapai persentase 72.89 % . Hal ini menunjukkan bahwa teks UUD 1945 berisi aturan-aturan untuk melakukan sesuatu atau bertindak sehingga proses material paling banyak ditemukan di dalam isi teks tersebut.

### 3.2. Partisipan

Partisipan yang terlibat didominasi oleh pelaku sejalan dengan proses yang sudah dipaparkan di atas. Proses material dengan partisipan terlibat yaitu, pelaku sebagai Partisipan I dan gol Partisipan II. Di antara Partisipan I dan Partisipan II yang mendominasi adalah Partisipan I.

Berikut ini disajikan secara berurutan proporsi partisipan yang terdapat di dalam teks UUD 1945.

Tabel 2. Proporsi Partisipan

No.	Proses	Partisipan I	Persentase (%)	Partisipan II	Persentase (%)
1.	Material	37	56.92	72	75.00
2.	Relasional	15	23.08	16	16.67
3.	Verbal	8	12.30	6	6.25
4.	Mental	2	3.08	2	2.08
5.	Wujud	2	3.08	-	-
6.	Tingkah laku	1	1.54	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>65</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>100</b>

Dari data proporsi partisipan di atas didominasi oleh Partisipan I sebagai pelaku dengan proporsi 56.92% dan Partisipan II dengan proporsi 75.00%. Proporsi Partisipan I menyatakan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan oleh pelaku. Partisipan II menunjukkan bahwa teks UUD 1945 naskah pertama yang belum diamandemen membutuhkan banyak tindakan yang harus dikerjakan atau dilaksanakan karena susunan pemerintahan Rakyat Indonesia masih baru sehingga tidak sebanding dengan jumlah pelaku yang terlibat di dalam tindakan tersebut. Pelaku sebagai Partisipan I memiliki tindakan (gol) yang lebih dari satu.

Partisipan I memiliki dua kategori yakni, Partisipan I *tunggal* dan Partisipan I *jamak*. Partisipan I *tunggal* didominasi oleh Presiden sebagai pelaku tindakan. Partisipan II *jamak* didominasi oleh (WNI, Negara, dan Pemerintah).

Berikut partisipan yang terdapat dalam teks UUD 1945 sebagai berikut:

Bentuk Tunggal:

1. Presiden mengangkat duta dan konsul
2. Presiden menerima duta negara lain
3. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi

Bentuk Jamak :

1. Maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu
2. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia

### 3.3. Sirkumstan

Dari teks UUD 1945 diketahui ada 71 sirkumstan dari 118 klausa. Sirkumstan tersebut yakni, sirkumstan rentang (waktu dan tempat), sirkumstan lokasi (waktu dan tempat), sirkumstan cara, sirkumstan sebab, sirkumstan lingkungan, sirkumstan penyerta, sirkumstan peran, sirkumstan masalah, sirkumstan pandangan dan tujuan. Sirkumstan pada teks UUD 1945 tidak ditemukan berjenis sirkumstan rentang jarak. Sirkumstan yang paling banyak ialah sirkumstan cara dengan persentase tertinggi 30.99% , sirkumstan pandangan dengan persentase 14.09% dan tujuan dengan persentase 11.27% , diikuti oleh sirkumstan lainnya dan sirkumstan sebab hanya ada satu dengan persentase 1.40%.

Sirkumstan cara dan pandangan tersebut yakni, *dengan cara undang-undang* dan *menurut undang-undang* atau *berdasarkan undang-undang*. Sirkumstan ini menandakan segala hubungan warga Negara Indonesia, lembaga Negara Indonesia, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, berpedoman atau berdasarkan atau pandangan Undang-Undang.

Tabel 3. Proporsi Sirkumstan

No	Sirkumstan	Jumlah	Presentase (%)
1	Rentang Waktu	7	9.86%
	Tempat	0	0%
2	Lokasi Waktu	5	7.05%
	Tempat	5	7.05%
3	Cara	22	30.99%
4	Sebab	1	1.40%
5	Lingkungan	4	5.63%
6	Penyerta	3	4.22%
7	Peran	4	5.63%
8	Masalah	2	2.81%
9	Pandangan	10	14.09%
10	Tujuan	8	11.27%
<b>Jumlah</b>		<b>71</b>	<b>100%</b>

Sirkumstan yang mendominasi ialah sirkumstan cara dan sirkumstan pandangan. Hal ini menunjukkan bahwa teks UUD 1945 sebagai teks yang berisi aturan-aturan untuk melakukan sesuatu atau bertindak memuat cara yang harus dilakukan masyarakat Indonesia ketika melakukan sesuatu tindakan. Tindakan tersebut haruslah sesuai dengan sirkumstan cara dan pandangan yakni, *dengan undang-undang* dan *menurut undang-undang*.

Tabel 4. Jenis Sirkumstan

1	Rentang	Waktu	Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya <i>selama masa lima tahun</i>
		Tempat	-
2	Lokasi	Waktu	Maka pemerintah menjalankan anggaran <i>tahun yang lalu</i>
		Tempat	Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun <i>di ibu kota Negara</i>
3	Cara		Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan <i>dengan undang-undang</i>
4	Sebab		Karena (adalah) tidak sesuai <i>dengan perikemanusiaan dan perikeadilan</i>
5	Lingkungan		<i>Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa</i> , Presiden berhak
6	Penyerta		Presiden <i>dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat</i> menyatakan perang

7	Peran	menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang
8	Masalah	memberi jawab atas pertanyaan Presiden
9	Pandangan	Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama
10	Tujuan	Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya

Letak sirkumstan pada teks UUD 195 memiliki letak berbeda-beda. Letak sirkumstan lingkungan pada klausa nomor 5 berada pada bagian awal atau posisi letak sebagai tema. Sedangkan sirkumstan penyerta terletak di bagian tengah sebagai rhema bukan sebagai tema. Sangat berbeda dengan sirkumstan rentang, lokasi cara, sebab, peran, masalah, pandangan dan tujuan berada pada bagian akhir pesan, yaitu sebagai rhema. Hal ini menunjukkan bahwa lazimnya sirkumstan di dalam bahasa Indonesia letaknya pada bagian akhir atau sebagai rhema.

#### 3.4. Logicosemantic Relation (Hubungan Logis Semantik)

Hubungan logis semantik yang ditemukan di dalam teks UUD 1945 di dominasi oleh hubungan logis pada tataran hipotaksis sebanyak 23 (setara dengan 56.09%) dan pada tataran parataksis sebanyak 18 (setara dengan 43.91%).

Tabel 5. Proporsi Hubungan Logis Semantik

No	Hubungan logis	Jumlah		
		Parataksis	Hipotaksis	Persentase %
1	1+2	15	-	36.59%
2	1=2	0	-	0%
3	1x2	3	-	7.31%
4	1"2	0	-	0%
5	1'2	0	-	0%
6	$\alpha + \beta$	-	0	0%
7	$\alpha = \beta$	-	3	7.31%
8	$\alpha x \beta$	-	19	46.34%
9	$\alpha \text{ " } \beta$	-	1	2.43%
10	$\alpha \text{ ' } \beta$	-	0	0%
	Jumlah	18	23	43.91% <b>56.09%</b>
			41	100%

Berdasarkan hasil perhitungan data tersebut diketahui bahwa hubungan logis semantik di dalam teks UUD 1945 berada pada tingkat tertinggi hingga terendah, yakni  $\alpha x \beta$ , 1+2,  $\alpha = \beta$ , 1x2, dan  $\alpha \text{ " } \beta$ . Pada tingkat tertinggi berada pada tataran hipotaksis  $\alpha x \beta = 46.34\%$ . Kemudian diikuti oleh  $\alpha = \beta = 7.31\%$  dan tingkat terendah pada tataran ini adalah  $\alpha \text{ " } \beta = 2.43\%$  sedangkan pada tataran parataksis berada pada tingkat tertinggi adalah 1+2 = 36.59% dan 1x2 = 7.31%. dengan demikian, teks UUD 1945 pada tataran hipotaksis tersebut menunjukkan hubungan ganda, *enhancement* (x) pada klausa kompleks dengan tujuan memperkuat makna pada klausa primer (pertama) dan pada tataran *ekstension* (+) untuk memperluas makna klausa primer. Hubungan logis semantik pada tataran parataksis tidak ditemukan hubungan yang menyatakan 1=2, 1"2, dan 1'2. Begitu juga pada tataran hipotaksis tidak ditemukan hubungan yang menyatakan  $\alpha + \beta$  dan  $\alpha \text{ ' } \beta$ .

Berikut ini contoh hubungan logis semantik yang terdapat pada teks UUD 1945. Disajikan secara berurutan dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah.

Tabel 6. Hubungan Logis Semantik

1	Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan[[yang ]] peraturannya ditetapkan dengan undang-undang	$\alpha \times \beta$
2	Dan (warga Negara) wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya	1+2
3	Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang	$\alpha = \beta$
4	dan sesudahnya (Presiden dan Wakil Presiden) dapat dipilih kembali	1x2
5	[[Bahwa sesungguhnya]] kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa	$\alpha \text{ “} \beta$

### 3.5. Metafora leksikal

Ditemukan metafora leksikal pada teks UUD 1945 metafora leksikal. Metafora leksikal tersebut membandingkan nomina dengan nomina, nomina dengan verba, dan nomina dengan adjektifa. Tidak terdapat perbandingan konsep ideologi, komunitas, sosial, dan penanda bunyi. Pengalaman metafora leksikal terdapat di dalam teks UUD 1945 sebagai berikut:

1. Nomina dibandingkan dengan nomina

<i>Ketuhanan</i>	=	<i>Yang Maha Esa</i>
N		N

2. Nomina dibandingkan dengan verba

<i>Mengeluarkan</i>	=	<i>Pikiran</i>	dengan lisan dan tulisan dan sebagainya
V		N	

3. Nomina dengan Adjektifa

Menjalankan segala undang undang	dan peraturannya	=	dengan selurus-lurusnya
	N		A

## 4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan, yaitu (1) sebagai teks yang berisi aturan aturan untuk bertindak atau melakukan sesuatu didominasi oleh proses material bersamaan dengan sirkumstan cara dan partisipan tunggal, yakni presiden dan pemerintah (2) Hubungan Logis Semantik didominasi  $\alpha\beta$  pada tataran hipotaksis digunakan untuk memperkuat klausa primer (utama) sedangkan pada tataran parataksis berada pada tingkat tertinggi adalah 1+2 digunakan untuk memperluas klausa primer (3) metafora leksikal mencakup Nomina: Nomina, Nomina: Verba, dan Nomina: Adjektifa.

## References

- [1] Sawirman, Setia, E., Sinar, T. S., Subyantoro, Susanto, & Nanda, D. sis. (2018). Linguistik Forensik. *Seminar Nasional Dan Workshop Linguistik Forensik*.
- [2] Setia, E. (2008). *Klausa Kompleks dan Realisasi Pengalaman dalam Teks Peradilan (Kasus Bom Bali-I) Sebuah Analisis Linguistik Fungsional Sistemik*. Universitas Udayana.
- [3] Qammar, N., & Djanggih, H. (2017). Peran Bahasa Hukum dalam Perumusan Norma-Norma Perundang-undangan. *JIKH*, 11(3), 337–347.
- [4] Halliday, M. A. K., & Matthessen, C. M. I. . (2014). *An Introduction to Functional Grammar* (Issue December). Oxford University Press. [https://www.functionalmedicine.org/files/library/Intro\\_Functional\\_Medicine.pdf](https://www.functionalmedicine.org/files/library/Intro_Functional_Medicine.pdf)
- [5] De Oliveira, L. C. (2015). A Systemic-Functional Analysis of English Language Learners' Writing. *D.E.L.T.A*, 31(1), 207–237.
- [6] Alaei, M., & Ahangari, S. (2016). A Study of Ideational Metafunction in Joseph Conrad's 'Heart of Darkness': A Critical Discourse Analysis. *English Language Teaching*, 9(4), 203–213.
- [7] Kondowe, W. (2014). Presidents and Ideologies: A Transitivity analysis of Bingu wa Mutharika's inaugural address. *International Journal of Language and Linguistics*, 2(3), 174–180.
- [8] Miles, M.B; Huberman, A.;Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.